

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
INDIKATOR KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**HENDY ISHARYANTO**

**NPM : 1621020008**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
INDIKATOR KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**HENDY ISHARYANTO**

**NPM : 1621020008**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak. Namun kekerasan pada anak masih saja terjadi. Adanya kebijakan Menteri PP dan PA dalam Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Pemerintah kabupaten Way Kanan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang menginisiasi kebijakan KLA, dalam memenuhi 24 indikator dan substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster ini belum dapat terpenuhi semuanya.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan dan bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan, dan analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan, namun belum maksimal. Dari 24 indikator ada beberapa poin yang belum terimplementasi, seperti masih adanya tindak kekerasan dan perkawinan anak, sarana infrastruktur dan ruang bermain publik yang ramah anak masih sangat minim, dan kawasan dilarang merokok yang baru terlaksana di area perkantoran. Analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Karena dalam ketentuan Islam maupun fiqh siyasah, manusia dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak dan harus memenuhi hak-hak anak.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendy Isharyanto  
NPM : 1621020008  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

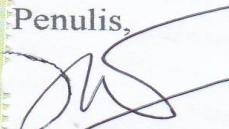
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 25 November 2019

Penulis,

  
**Hendy Isharyanto**

1621020008





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

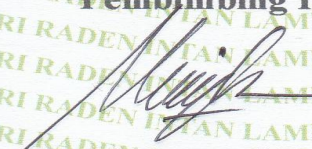
**PERSETUJUAN**

Nama : Hendy Isharyanto  
NPM : 1621020008  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator  
Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)

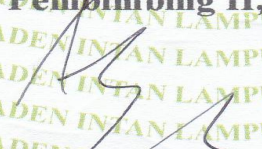
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

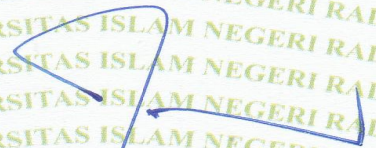
**Pembimbing I,**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 196003291987031003**

**Pembimbing II,**

  
**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197408162003122004**

**Ketua Jurusan**

  
**Frenki, M. Si.**  
**NIP. 198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)” disusun oleh, Hendy Isharyanto, NPM : 1621020008, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020

**Tim Penguji**

**Ketua : Frenki, M. Si.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**



**Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Khairuddin Tahmid, M.H.**  
NIP. 196210221993031002



## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

(QS. An Nisa [4] : 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.



## PERSEMBAHAN

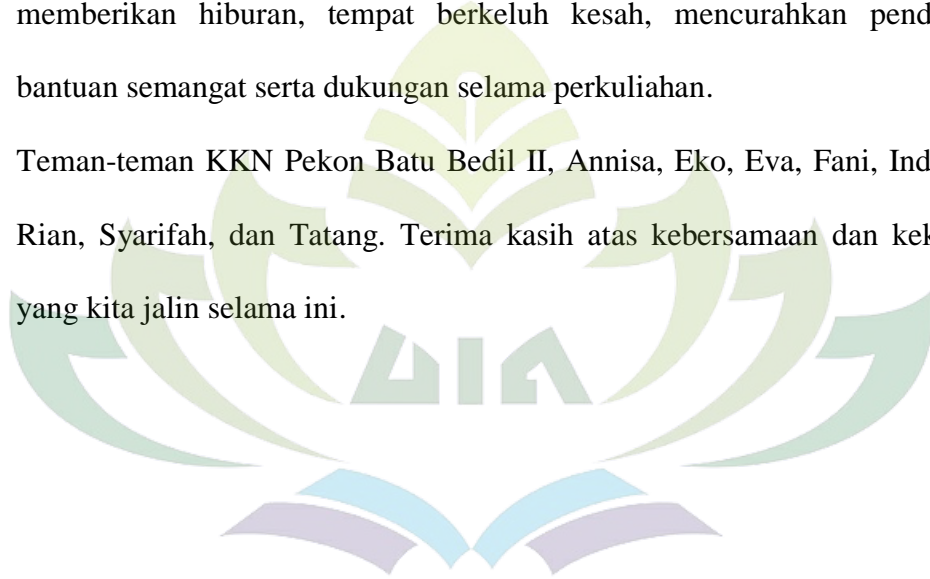
Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan *Al-Fatihah* beriring selawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Subiyadi dan Ibu Aisyah. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kalian berdua, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
2. Wawak Hi. Dani Alin yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk kelancaran perkuliahanku.
3. Aak Andi Septa Wijaya dan Mba Iin Inziah yang telah mendukungku dalam setiap langkah perkuliahan.
4. Kepada keluarga besarku, makde Juwairiyah, kakak sepupu, Darsono, Susi Lawati, Ahmad Riyadi, Eka Heryanti dan (Almh) Eka Sulastri yang telah



memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

5. Teman-teman seperjuangan Prodi Siyasaah Syar'iiyyah (HTN) A, Afifah, Elina, Erlangga, Lutfi, Indah, Firman, Rizal, Yolan dan yang lainnya tanpa terkecuali yang menjadi pendukung, penyemangat, pemberi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju.
6. Geng Grup Faedah, Ellemmia, Desti, Ayu, Hepi, dan Wahyu yang telah memberikan hiburan, tempat berkeluh kesah, mencurahkan pendapat, dan bantuan semangat serta dukungan selama perkuliahan.
7. Teman-teman KKN Pekon Batu Bedil II, Annisa, Eko, Eva, Fani, Indah, Jeany, Rian, Syarifah, dan Tatang. Terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kita jalin selama ini.



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hendy Isharyanto dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 06 Juni 1998, dan merupakan putra dari Bapak Subiyadi dan Ibu Aisyah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak IKI PTPN VII Blambangan Umpu yang diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Negeri Baru diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 5 Blambangan Umpu diselesaikan pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blambangan Umpu pada tahun 2016.

Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur undangan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota *Moot Court Community* (MCC) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Pekon Batu Bedil, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”** Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhamad SAW para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Inatn Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Frenki, M. Si. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A Selaku Pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Siyasah Syar'iyah yang telah banyak memberi pengetahuan dan pengalaman saya, dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik
5. Bapak Yunada Atiek, selaku Kepala Dinas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, dan Ibu Ciunah, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Ibu Endang Sari Ningsih, Ibu Nurlela, Ibu Yonia Ivana serta Ibu Aisyah, Sumarni, Rita Emilia, Rismawati, dan Eva Yusma.
6. Teruntuk teman-teman sekelas dan seperjuangan Siyasah Syar'iyah A terimakasih telah banyak memberi bumbi dalam penelitian ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu kalian berikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *ukhuwah islamiyah*.

Bandar Lampung, 25 November 2019

**Hendy Isharyanto**  
**1621020008**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Signifikansi Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian .....	12

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori .....	18
1. Perlindungan Anak dalam Islam .....	18
a. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya.....	18
b. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	21
c. Hak dan Kewajiban Anak.....	26
2. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif.....	34
a. Pengertian Anak .....	34
b. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	36
c. Hak dan Kewajiban Anak.....	44
3. Kota Layak Anak .....	48
a. Pengertian Kota Layak Anak dan Dasar Hukum Kota Layak Anak .....	48
b. Indikator-Indikator Kota Layak Anak .....	55
B. Tinjauan Pustaka.....	58

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan .....	64
1. Sejarah Singkat.....	64
2. Visi dan Misi .....	66
3. Struktur Organisasi.....	67
B. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Dalam Mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak .....	71

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan .....	89
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan .....	99

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Rekomendasi.....	104

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN.....**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Blangko Konsultasi Pembimbing
2. Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Provinsi
3. Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Kabupaten
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
5. Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
6. Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Penelitian ini berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)**”. Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 393.

<sup>2</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008),h. 11.

3. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>3</sup> Dalam skripsi ini, yang dimaksud implementasi adalah pelaksanaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan terhadap Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011.
4. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan. Dalam skripsi ini, yang dimaksud indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.<sup>4</sup>
5. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>5</sup>
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PP, PA, Penduk, dan KB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang

---

<sup>3</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press), h. 342.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012, hlm. 7. Pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup>*Ibid*, Pasal 1 ayat (2).



pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>6</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, dapatlah penulis tegaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Dalam penulisan penelitian ini terdapat alasan yang kuat sehingga menarik perhatian penulis untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam judul diatas, yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, melihat keadaan sekarang banyak kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, maka kesejahteraan anak serta kepentingan terbaik baginya harus menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah maupun masyarakat, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan layak sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan adanya kenyataan seperti ini membuat penulis tertarik ingin mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan ini.

---

<sup>6</sup>Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, Pasal 2 ayat (1).

## 2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan).
- b. Referensi yang terkait penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Syariah pada program studi Siyasah Syar'iiyyah.

## C. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan, dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>7</sup>

Tentang aspek hukum perlindungan anak. Arif Gosita, mengatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan, Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>8</sup>

Dalam hal penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Selain UUD 1945, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Undang-undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>7</sup>M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

<sup>8</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 14.



2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalam Islam, ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak menjelaskan tentang hak-hak anak, seperti menyatakan bahwa anak-anak itu adalah perhiasan dunia.

Sebagaimana dalam firman Allah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi [18] : 46)

Kemudian adanya larangan membunuh anak karena takut kemiskinan, Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al-An'am [6] : 151)

Hak anak juga termasuk diberikan Air Susu Ibu (ASI) oleh ibunya.

Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS Al-Baqarah [1] : 233)

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.<sup>9</sup>

Maka dari itu, hubungan sinergitas antara pemimpin (imam)/pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”<sup>10</sup>

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyash* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat.

Masyarakat mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Banyak

---

<sup>9</sup>Chusniatun, “Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam” (On-Line), tersedia di : <http://journals.ums.ac.id>, (12 Juli 2019).

<sup>10</sup>Jalal Ad-Din ‘Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair min Qawa'id wa Furu' Asy-Syafi'iyah* (Dar As-Salam, 1432 H), h. 320.

kasus–kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu maka perlu adanya analisis terhadap kinerja implementasi kebijakan kota layak anak, salah satunya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Peraturan Menteri tersebut dalam Pasal 5 ayat (1, dan 2) menyebutkan bahwa,

- 1) Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA.
- 2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster hak anak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 5.



Kemudian dalam pasal 7 diuraikan tentang Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus”.<sup>12</sup>

Kabupaten Way Kanan, salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang menginisiasi kebijakan KLA dan sudah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan hak-hak anak berusaha menjadi kabupaten yang ramah anak. Dengan terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi anak dalam menampung aspirasi dan keluhan anak-anak di Kabupaten Way Kanan, sosialisasi Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Kampung/Kelurahan Layak Anak (KAKELA) juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah agar pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Way Kanan yang dalam hal perlindungan anak diketuai oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Namun Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam memenuhi 24 indikator dan substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster tersebut

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 7.

belum dapat terpenuhi semuanya, terdapat faktor-faktor yang menghambat pemenuhan indikator KLA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh pandangan Fiqh Siyasah mengenai kesiapan pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dan instansi terkait dalam mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada implementasi indikator kabupaten kota layak anak studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam upaya melindungi anak dari segala tindak kekerasan serta terpenuhinya hak-hak anak.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan?

2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak tersebut di Kabupaten Way Kanan?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan wawasan maupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Yaitu dapat menjadi informasi bagi masyarakat dalam upaya mengimplementasikan KLA, sekaligus menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya dengan persoalan yang sama.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>13</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>14</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud penelitian deskriptif analitis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>15</sup>

### 2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>16</sup> Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa,

---

<sup>13</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

<sup>14</sup>Husaina Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 5.

<sup>15</sup>*Metodologi Penelitian, Ibid*, h. 16.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173.

atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas, dan pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan serta para orang tua dari anak-anaknya di Kabupaten Way Kanan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>17</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun yang akan menjadi informan adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, para pegawai dan orang tua dari anak-anaknya.

Maka dalam hal penentuan informan dalam penelitian ini diambil dari 1 kepala bidang, 2 kepala seksi, dan 5 orang tua dari anak-anaknya,

---

<sup>17</sup> *Metodologi Penelitian, Ibid*, h. 120.

dimana pemilihan tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan informan yaitu kepala bidang, para pegawai Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan orang tua dari anak-anaknya.

#### b. Data Sekunder

Adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian secara umum, dan Al-Qur'an serta undang-undang yang berkaitan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi dilakukan berfungsi sebagai sebagai eksplorasi. Dari hasil ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya, melukiskannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah.<sup>18</sup>

##### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.<sup>19</sup> Dokumen yang dapat digunakan berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

##### c. Wawancara

Adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mengumpulkan keterangan serta pendapat-pendapat mereka.<sup>20</sup> Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi (pewawancara) atau *interviewer* dan pemberi informasi (informan)/partisipan atau responden. Biasanya kedua belah pihak berhadapan secara fisik.

---

<sup>18</sup>S Nasution, *Metode Research* ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) h. 106.

<sup>19</sup>*Metodologi Penelitian, Ibid*, h. 170.

<sup>20</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 95.



Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan menyeleksi data yang sudah terkumpul tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dikelompokkan terhadap data sesuai dengan kerangka pembahasan yang sudah ditentukan dan pensistematisasian data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

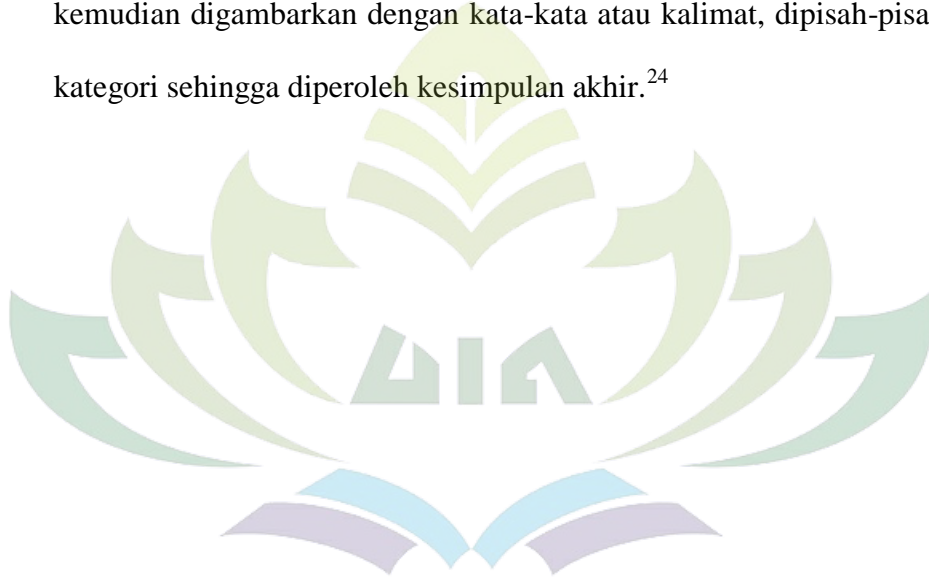
Setelah data diperoleh dan terkumpul melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya diolah sesuai peruntutannya dan kemudian dianalisa dengan metode *content analysis*, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 247.

dilakukan secara objektif dan sistematis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian.<sup>22</sup> Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>23</sup>

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.<sup>24</sup>



---

<sup>22</sup>Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian* ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 13.

<sup>23</sup>*Metodologi Penelitian, Ibid*, h. 5.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 4.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Perlindungan Anak dalam Islam

###### a. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Istilah fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).<sup>25</sup>

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.

Maksud dari dalil-dalil yang rinci di atas, setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun dalil tersebut tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

As *siyasah* berasal dari kata-kata, *saasa* – *yasuusu* – *siyaasah* yang artinya “Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”.

---

<sup>25</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 2.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.<sup>27</sup>

Adapun ruang lingkup fiqh siyasah di kalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga yakni.<sup>28</sup>

#### 1) *Siyasah Dusturiyyah*

Permasalahan didalamnya membahas hubungan antara pemimpin/imam di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, seperti membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh

---

<sup>26</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta :Erlangga, 2008), h. 26.

<sup>27</sup>*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Ibid*, h. 11

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 16.



hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2) *Siyasah Kharijiyyah*

Membahas tentang tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

3) *Siyasah Maliyyah*

Membahas sumber kuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara.

Sedangkan menurut al Mawardi dan Ibn Taimiyyah dalam buku karangan *fiqh siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. yaitu:<sup>29</sup>

Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu,

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*
- 2) *Siyasah Maliyyah*
- 3) *Siyasah Qadhiyyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Harbiyyah*
- 5) *Siyasah `Idariyyah*

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu,

- 1) *Siyasah Qadhiyyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah `Idariyyah*
- 3) *Siyasah Maliyyah*
- 4) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Adapun penjelasan dari Hasbi Ash Shieddieqy, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)

---

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.14.

<sup>30</sup>*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Ibid*, h. 30.

- 2) *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

b. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak merupakan karunia, anugerah, dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua, dimana kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas berbagai aspek kehidupannya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari segala tindak kekerasan.

Al-Qur'an banyak sekali menceritakan tentang kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh dari para Nabi. Seperti kisah kepasrahan dan kepatuhan Ismail terhadap mimpi ayahnya, Ibrahim dalam surah as-Saffat, kemudian kisah nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman, dan Nabi Yusuf kecil dalam surah Yusuf. Semua kisah dalam Al-Qur'an tersebut mengandung banyak sekali pesan tersirat tentang pendidikan dan perlindungan anak.<sup>31</sup>

Di dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang dipakai untuk anak yakni *al-thifl* (anak bayi laki-laki, termasuk kanak-kanak. ia secara

---

<sup>31</sup> Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 6 No. 2, Juli 2014, h. 2.

majaz disebut laki-laki sampai masa baligh), *al-walad*, *al-shabî*, *alshaghir* (anak kecil), dan *al-ghulam* (remaja/anak baru gede/ABG).<sup>32</sup>

Pertama, *al-thifl*. Kata *al-thifl* dimaknai dengan bagian kecil dari segala sesuatu atau unsur dari suatu benda baik yang nampak atau tidak, Secara terminologi kata *al-thifl* (dalam bentuk mufrad) berarti anak yang baru saja lahir atau anak yang belum tumbuh besar sampai usia ketika ia mulai mengerti aurat. Sedangkan dalam bentuk jamaknya, yakni *al-athfal*, biasanya menunjuk kepada anak-anak yang telah mengetahui dan mengerti tentang aurat.

Kedua, *al-shaghir*. *al-shaghir* menurut bahasa berarti anak kecil, sebagai lawan dari kata *al-kabir* (orang dewasa/ yang besar). Di dalam syariat Islam, anak juga disebut *ghulam* (anak kecil, remaja, sampai masa baligh). Kata *ghulam* lebih dekat kepada pengertian yang diberikan kepada anak di fase terakhir pertumbuhannya yakni yang biasa kita kenal dengan anak remaja. Setelah ini seseorang memasuki fase dewasa.<sup>33</sup>

Dalam Islam menginginkan anak-anak yang mampu melaksanakan tugas menyembah Allah dengan sebaik-baiknya dan mencapai tujuannya, seperti memiliki badan yang kuat dan sehat, terampil, berilmu, bercita-cita yang tinggi, berakhlak mulia, dan taat kepada peraturan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pentingnya

---

<sup>32</sup> Azhariah Fatia, Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis, *Jurnal JURIS*, Vol. 10 No. 1, Juni 2011, h. 2.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 3.

tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengembangkan kemanusiaan pada anak sejak kecil akan menentukan karakter anak itu di kemudian hari.

Adapun anak bagi orang tuanya dalam Islam memiliki beberapa arti, yakni :<sup>34</sup>

1) Sebagai rahmat Allah

Salah satu dari sekian banyak rahmat Allah yang diberikan kepada manusia adalah anak. Allah berfirman :

وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

“Dan Kami kembalikan kepadanya anak isterinya bersama mereka seganda mereka sebagai salah satu rahmat dari sisi Kami” (Q.S. Al Anbiya [21] : 84).

Jadi menurut ayat di atas, bahwa anak adalah rahmat Allah. Rahmat anak ini mungkin dianggap kecil saja oleh manusia. Bahkan manusia di abad ini banyak yang tidak menginginkan anak itu. Sebab merepotkan dan menyusahkan saja. Padahal hal rahmat anak ini adalah salah satu rahmat Allah yang bernilai tinggi dan mempunyai manfaat yang amat besar bagi kehidupan manusia, baik untuk di dunia maupun di akhirat nanti.

---

<sup>34</sup>Syahminan Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim* (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), h. 83.



## 2) Sebagai amanat Allah

Segala nikmat yang diberikan Allah kepada manusia sebagai amanatNya memiliki tujuan yaitu untuk disyukuri dan agar manusia mampu, cakap dan berhasil dalam melaksanakan tugas hidupnya sebagai khalifah Allah di bumi atau sebagai makhluk yang telah berjanji dengan Allah untuk menyembahnya.

Semua amanah tersebut nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah tentang pencarian dan penggunaannya. Termasuk anak dalam hal pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatannya.

## 3) Sebagai salah satu unsur kebahagiaan

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Furqan [25] : 74)

## 4) Sebagai penguji iman

Allah berfirman :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwasannya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian”. (QS. Al Anfal [8] : 28)

Ayat tersebut jelas sekali menyatakan, bahwa anak termasuk salah satu sarana yang dipakai Allah untuk menguji iman manusia, berarti orang tua harus mempelajari tentang anak-anaknya dalam hal jasmani dan rohani, dalam hal hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia dengan alam serta lain sebagainya, kemudian orang tua memperjuangkan perkembangannya, sehingga sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan rahmat anak itu kepadanya.

Dasar hukum perlindungan anak dalam Islam, bahwasannya Islam sangat memberi perhatian khusus terhadap anak, seperti di dalam Al-Qur'an yang telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apa lagi karena takut sengsara (miskin). Allah berfirman :

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا ذُو حَرِّمٍ رَّبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ  
وَأَيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh

jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". (QS. Al An'am [6] : 151)

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orangtua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah.<sup>35</sup>

Perlindungan anak dalam Islam adalah bersifat fitrah. bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.

Orang tua disini sangat memegang peranan penting terhadap perkembangan anak, sehingga ia juga tidak dapat mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam

---

<sup>35</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), h 15.

menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik.

c. Hak-Hak Anak dalam Islam

Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>36</sup> Sehingga dalam hal ini pemenuhan hak-hak anak bukan saja hanya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, melainkan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat dan negara.

Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak-hak anak-anak.<sup>37</sup> Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:<sup>38</sup>

1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

---

<sup>36</sup>Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi *Anakku Ayah dan Bunda Sayang Kamu*. (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 45.

<sup>37</sup>Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam tentang Perawatan Islam* (Bandung : al-Bayan, 1985), h. 15.

<sup>38</sup>Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam" (On-line), tersedia di: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120> (26 Oktober 2019)



“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskman. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”(QS. Al-An’am [6] : 151)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama untuk melakukan aborsi.

2) Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

3) Hak mendapatkan pengakuan nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa

anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.<sup>39</sup> Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT.

Berfirman:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ  
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Ahzab [33] : 5)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil.

Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

#### 4) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Para ahli fiqh, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, nafkah *ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, nafkah *furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.

---

<sup>39</sup> Hani Sholihah, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, h. 7.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS. Al Baqarah [1] : 233)

#### 5) Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakikatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orang tuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

#### 6) Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu)

Hal ini terdapat dalam surah Al Baqarah ayat (233), yang artinya: ”Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.

#### 7) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

#### 8) Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu

mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

#### 9) Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif, misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Sedangkan di dalam *Maqashid Al Khamsah* hukum disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT maupun produk manusia sendiri. Dengan tujuan ini, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian (idealitas) yang didambakan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum.

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 27.



- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain.
- b. Menegakan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim
- c. Merealisasikan kemaslahatan.

Gabungan misi atau tujuan hukum Islam disebut sebagai lima prinsip dasar hukum Islam atau *al-Khams* , yang meliputi:<sup>41</sup>

- a. *Hifd al-Din* atau memelihara agama.

Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas atau kelompok agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

- b. *Hifd al-Nafs* atau memelihara jiwa.

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini adanya tuntutan dari Islam untuk memberikan keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar atau hak atas penghidupan, hak kemerdekaan serta bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

---

<sup>41</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 227.

c. *Hifd al-Aql* atau memelihara akal.

Adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain supaya tetap sehat dan berfungsi dengan baik.

d. *Hifd al-Nasl* atau memelihara keturunan.

Memberikan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berkualitas karena manusia adalah makhluk mulia yang kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.

e. *Hifd al-Mal* atau memelihara harta.

Memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda, properti serta terdapat larangan mengambil hak yang bukan miliknya seperti mencuri, korupsi dan lain-lain.

## **2. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif**

a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial

secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak menjadi salah satu modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaan anak harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan, sehingga perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Dalam membangun generasi yang berkualitas dan berdaya guna serta dapat menepis kekhawatiran tentang generasi bangsa yang hilang, maka perlunya mendorong anak untuk bersemangat dan berkemauan dalam belajar, mengembangkan dirinya sendiri sebagai pribadi anak seutuhnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>42</sup> Juga dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

## b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>44</sup>

Perlindungan anak bermula pada Konvensi Hak Anak dimana kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi ia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari,

---

<sup>43</sup>H.M. Wagianto, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h. 15.

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

bersembunyi, terancam, dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Setelah perang, para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan pahit dimana suami atau saudaranya hilang bahkan juga ikut terluka. Para perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim-piatu. Akibat dari Perang Dunia I tersebut, munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.<sup>45</sup>

Salah satu orang diantara para aktivis perempuan itu adalah Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butiran-butiran pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *save the children fund international union*, yang antara lain berupa:<sup>46</sup>

- 1) Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga
- 3) Anak harus disediakan sarana-saran yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman

---

<sup>45</sup>M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24.

<sup>46</sup>Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 29



- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan atau pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, dan
- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada semua umat.

Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).<sup>47</sup>

Berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak, membutuhkan hasilnya dengan memasukkan hak-hak anak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Misalnya dalam pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”.

---

<sup>47</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 30

Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang hal ini menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap anak.<sup>48</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”<sup>49</sup>, lalu perlindungan yang spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian, pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dalam UU Nomor 35

---

<sup>48</sup> *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak, Ibid, h. 27.*

<sup>49</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mana kedudukannya sebagai lembaga independen setingkat dengan Komisi Negara dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 UU Nomor. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apa pun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan juga dilengkapi dengan beberapa dasar hukum yang menyangkut tentang perlindungan anak yakni:

Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan pemerintah dan pemerintah daerah wajib

---

<sup>50</sup>Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 161.

menjamin tersedianya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.<sup>51</sup>

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pasal 4 huruf (a) sampai (d) yakni dengan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>52</sup>

Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 2 ayat (1) yakni “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan tujuan mengeksploitasi seseorang dapat dipidana dengan kurungan 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 4 huruf (a) sampai (d).

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

Keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang terdapat dalam pasal (1,2, dan 3).

Kelima, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada pasal 2 yakni “menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak, mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak dan mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak”.<sup>54</sup>

Keenam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak pada pasal 2 huruf (a sampai c) yakni “menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak, mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (*trafficking*) orang

---

<sup>54</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Pasal 2.



khususnya perempuan dan anak, mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (*trafficking*) orang khususnya perempuan dan anak”.<sup>55</sup>

Ketujuh, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal (6) yakni “jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi antara lain: layanan kesehatan, kelangsungan layanan pendidikan, layanan rehabilitasi sosial dan psikologis, akta kelahiran, layanan bantuan hukum, dan layanan reintegrasi sosial.”<sup>56</sup>

Kedelapan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam pasal (8) yakni “perlindungan sementara serta dukungan dari semua pihak, bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum disertai proses hukum, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan medis dan pelayanan darurat, penanganan secara rahasia, pendampingan, tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal alternatif”.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak, Pasal 2 huruf (a) sampai (c).

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 6.

<sup>57</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Pasal 8.

c. Hak dan Kewajiban Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun ia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.<sup>58</sup> DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua manusia, tidak terkecuali anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus.

Dalam Konstitusi Indonesia, mengatur hak-hak anak secara khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak-Anak. Dalam Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

---

<sup>58</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 16 ayat (3).

pemerintah, dan pemerintah daerah”.<sup>59</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam KHA.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, antara lain:<sup>60</sup>

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*)
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)
- c) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Rights*)
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12).

<sup>60</sup> Mohammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 19990, h. 35).

- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- 7) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 8) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- 11) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 14) Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam

- peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan, dan kekerasan seksual
- 16) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
  - 17) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  - 18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :  
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
  - 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  - 20) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang harusnya dilakukan, antara lain:<sup>61</sup>

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **3. Kota Layak Anak**

#### **a. Pengertian Kota Layak Anak dan Dasar Hukum Kota Layak Anak**

Kota/Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/swasta yang terencana secara

---

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 19.



menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Artinya:

- 1) Memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara pribadi maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan daerah, fasilitas dan pelayanan kota/kabupaten.
- 2) Mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas sosial lainnya
- 3) Menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- 4) Memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kabupaten/kota yang berkualitas (sarana air bersih, ruang bermain, jalur sekolah) persyaratan keselamatan; persyaratan kesehatan; persyaratan kemudahan; dan persyaratan kenyamanan.
- 5) Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.<sup>62</sup>

Program ini oleh UNICEF dinyatakan sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak di tingkat lokal, yang dalam prakteknya diartikan bahwa hak-hak anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program, dan anggarannya. Tolak ukur keberhasilan kota/kabupaten layak anak adalah menjadikan masyarakat kota dan anak sebagai subjek pembangunan, terpenuhinya lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, hak

---

<sup>62</sup>Sari, Kanthi Pamungkas, Sri Margowati, Analisis Harvard Pada Implementasi Program Kota Layak Anak, *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI No. 1, Juni 2016.

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus yang berkesesuaian dengan isu-isu nasional tentang demokrasi, reformasi, dan partisipasi anak. Keterlibatan masyarakat ini juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas kehidupan anak Indonesia di masa mendatang.

KLA atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *child-friendly city* (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan *Growing Up City*. Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico, dan Polandia. Tujuan uji coba adalah mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Konsep *child-friendly city* (KLA) sendiri diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal.<sup>63</sup>

Konsep Kota Layak Anak di Indonesia merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudia

---

<sup>63</sup> Noverman Duadji, Novita Tresiana, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 40.

disingkat KLA. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Secara normatif yuridis, pengembangan KLA terdapat dalam *World Fit for Children*, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.<sup>64</sup>

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:<sup>65</sup>

- a) non diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b) kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 41.

<sup>65</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 2.

dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Sedangkan tujuan kebijakan KLA itu sendiri yaitu :<sup>66</sup>

- a) Meningkatkan komitmen pemerintah masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak,
- b) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
- c) Mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan atau perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d) Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah kabupaten/Kotadengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemerintahan provinsi melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan KLA di kabupaten/kota di wilayahnya. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan KLA dan

---

<sup>66</sup>*Ibid*, Pasal 3.

bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KLA di wilayahnya dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi.

Untuk mengefektifitaskan pelaksanaan kebijakan KLA di kabupaten/kota maka dibentuk Gugus Tugas KLA yang dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja sejenisnya, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA pun harus disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) di kabupaten yang memuat program aksi sesuai dengan prioritas dan kemampuan kabupaten/kota.

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA dapat dilihat dari indikator umum dan khusus. Indikator umum meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta pariwisata, sedangkan indikator khusus meliputi bidang pembuatan kebijakan, dan promosi pelaksanaan kebijakan KLA.

Tahapan pengembangan KLA meliputi:<sup>67</sup>

- a. persiapan, terdiri dari komitmen atau dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten/kota, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan pengumpulan data dasar
- b. perencanaan, terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA
- c. pelaksanaan, dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

---

<sup>67</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 4 ayat (1).

Kabupaten/kota yang telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan KLA akan diberikan penghargaan oleh pemerintah dengan maksud untuk menjaga keberlanjutan program yang peduli terhadap anak. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada Peringatan Hari Anak Nasional. Adapun tingkatan kriteria Kota Layak Anak terdiri dari, KLA Pratama, KLA Muda, KLA Madya KLA Nindya, dan KLA Utama.

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, sedangkan untuk di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Pemerintah dapat memberikan bantuan anggaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kabupaten/kota layak anak di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dunia usaha dapat memberikan bantuan anggaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kabupaten/kota layak anak di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Kota Layak Anak (KLA) sangatlah diperlukan, dikarenakan data-data menunjukkan masih banyaknya pelanggaran atas hak anak. Beberapa kebijakan anak sudah mulai dikeluarkan, namun implementasinya masih belum maksimal. Masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, mengalami pernikahan di usia dini, anak-anak yang bekerja, belum terpenuhinya akta kelahiran, serta masih adanya anak-anak yang harus terjebak dalam perdagangan anak, baik untuk tujuan



seksual maupun perdagangan obat terlarang. Oleh karena itu, peran stakeholder, khususnya instansi terkait dalam anak, perguruan tinggi, dan lembaga advokasi anak maupun komunitas masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Duadji dan Tresiana melihat ada tiga instrumen sebuah kota dikatakan layak anak, yakni: Pertama, kota haruslah memiliki tempat bermain untuk anak, kedua, kota harus bersih dari kekerasan terhadap anak, baik lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, ketiga, kota harus memiliki penjaminan perlindungan terhadap hak anak. Dengan demikian ada dua klaster utama hak anak yang harus dipenuhi, yaitu hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungan anak.<sup>68</sup>

b. Indikator-Indikator Kota Layak Anak

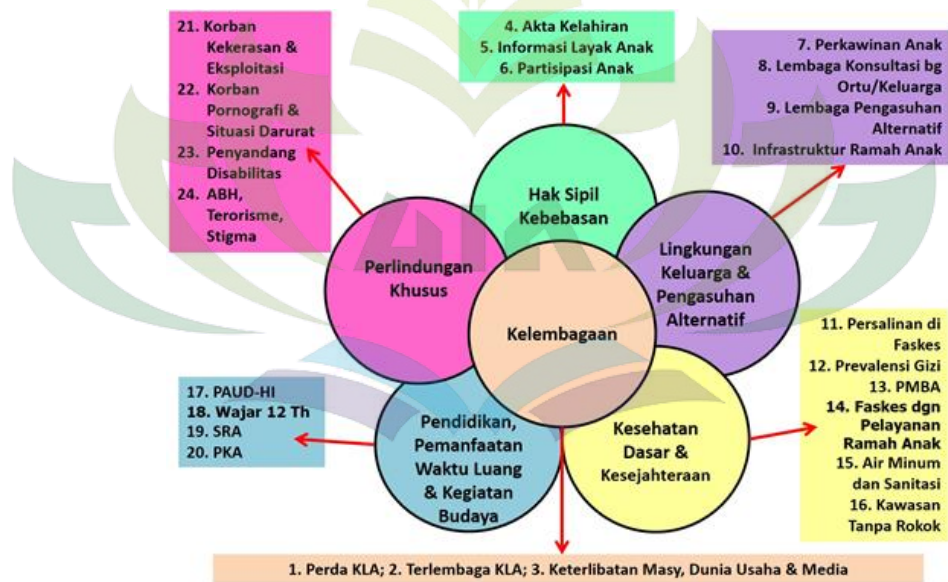
Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 24 (dua puluh empat) 'Indikator Pemenuhan Hak Anak' yang sekaligus juga merupakan 'Indikator KLA', Kedua puluh empat indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan, dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan

---

<sup>68</sup>Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan, *Ibid*, h. 41.

kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.<sup>69</sup>

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Indikator KLA ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.



Sumber : <http://www.kla.id/indikator-kla/>

<sup>69</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Bab I, h. 7.

a) Penguatan Kelembagaan

1. Peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak
3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media masa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

b) Klaster Hak Anak

Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan

4. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
5. Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6. Terlembaganya partisipasi anak

Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

7. Persentase perkawinan anak
8. Tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga
9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif dan terstandarisasi
10. Tersedianya infrastruktur (secara sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak

Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

11. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
12. Prevalensi status gizi balita
13. Persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun
14. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
15. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak anak
16. Tersedianya kawasan tanpa rokok

Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

17. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
  18. Persentase wajib belajar 12 tahun
  19. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
  20. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak
- Klaster V : Perlindungan Khusus
21. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
  22. Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative dan diversi
  23. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
  24. Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

## **B. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa karya penelitian terdahulu, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Dian Ferdisa Puteri (2017) yang berjudul “Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penerapan Kota Layak Anak”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya: Bagaimanakah Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan Kota Layak Anak dan Faktor-

faktor apakah yang menghambat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perencanaan Kota Layak Anak.<sup>70</sup>

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Proses perumusan dalam rangka perencanaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses perumusan dalam penerapan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan tersebut. Faktor penghambat yang mendominasi dalam rangka penerapan Kota Layak ini adalah belum adanya peraturan daerah yang mendukung dalam hal pelaksanaannya, dan peran masyarakat yang belum maksimal dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dengan cara dibentuknya kota layak anak ini.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ferdisa Putri yakni sama-sama meneliti tentang kebijakan Kota Layak Anak. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Way Kanan sedangkan Dian Ferdisa Putri membahas tentang perencanaan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan Kota Layak Anak.

---

<sup>70</sup> Dian Ferdisa Putri, "Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penerapan Kota Layak Anak". (Skripsi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).

2. Yuni Astuti (2017) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Memelihara Anak Terlantar". Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya: bagaimana peran Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial adalah untuk menjaga dan merawat anak terlantar mencapai kesejahteraan sosial karena itu termasuk tujuan yang ingin dicapai oleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang tidak dilarang hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum Islam, manusia dilarang untuk menelantarkan anaknya karena anak adalah amanah yang harus dijaga dan anak merupakan titipan Allah SWT.<sup>71</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti yakni sama-sama meneliti tentang perlindungan anak. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Way Kanan sedangkan Yuni Astuti membahas peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar.

---

<sup>71</sup> Yuni Astuti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Memelihara Anak Terlantar". (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).



3. Galuh Anggraini Tunga Dewi (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya: bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.<sup>72</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan melingkupi berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri yakni dengan meningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara melalui sosialisasi, edukasi, dan Informasi. Sedangkan tinjauan perspektif hukum Islam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan Lembaga Perlindungan Anak yang kegiatannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini ada ketentuannya dalam hukum Islam bahwasannya umat manusia dilarang melakukan tindak kekerasan/mendzalimi anak-anak dikarenakan anak merupakan amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dilindungi.

---

<sup>72</sup> Galuh Anggraini Tunga Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi yakni sama-sama meneliti tentang perlindungan anak dengan menggunakan deskriptif. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas kebijakan yang lebih spesifik yaitu Kota Layak Anak sedangkan Galuh Anggraini Tungga Dewi membahas peran Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak.

4. Peni Fitri Yanti (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Kasus Fenomena Pengemis Anak-anak di Bandar Lampung”. Penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu, bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pengemis membawa anak di Bandar Lampung dan bagaimana hukum Islam terhadap UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>73</sup>

Hasil penelitian tersebut masih adanya pengemis membawa anak di Bandar Lampung yang meminta-minta di jalan, disebabkan faktor ekonomi, dan faktor ditinggalkan keluarga. Hak dan kewajiban anak yang belum terpenuhi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi, dan Islam

---

<sup>73</sup> Galuh Anggraini Tungga Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018).

tidak mengajarkan untuk meminta-minta apalagi menggunakan anak sebagai alat untuk membuat masyarakat menjadi kasihan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Peni Fitri Yanti yakni sama-sama meneliti tentang perlindungan anak dengan menggunakan deskriptif. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas kebijakan tentang Kota Layak Anak di Way Kanan sedangkan Peni Fitri Yanti membahas implementasi Undang-undang tentang perlindungan anak di Bandar Lampung.

5. Riko Pangestu (2019) yang berjudul “Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Penelitian ini menarik permasalahan yakni, bagaimana perlindungan anak dalam perspektif pendidikan Islam di Indonesia.<sup>74</sup>

Hasil penelitian tersebut adalah bentuk perlindungan anak di Indonesia terdapat empat komponen yaitu perlindungan di bidang pendidikan yang berupaya membentuk anak menjadi insan kamil yang dilakukan dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat berpedoman pada prinsip pendidikan Islam, perlindungan di bidang sosial dengan upaya menciptakan kota layak anak merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan anak di bidang sosial terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak di daerah kota, perlindungan anak dari penelantaran dan perlindungan dari kekerasan.

---

<sup>74</sup> Riko Pangestu, “Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Islam”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Riko Pangestu yakni sama-sama meneliti tentang perlindungan anak dengan menggunakan deskriptif. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas kebijakan tentang Kota Layak Anak di Way Kanan sedangkan Riko Pangestu membahas perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif pendidikan Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006).

Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

As-Suyuthi, Jalal Ad-Din 'Abdurrahman, *Al-Asybah wa An-Nazhair min Qawa'id wa Furu' Asy-Syafi'iyah*, Dar As-Salam, 1432 H.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Duadji, Noverman, dan Novita Tresiana, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Makarao, Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Mu'thi, Abdullah Muhammad Abdul, *Anakku Ayah dan Bunda Sayang Kamu*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.

Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syarif, Mujaer Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press.

Usman, Husaina, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Wagianto, H.M., *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.

Zaini, Syahminan, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

### **Jurnal**

Azhariah Fatia, Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis, *Jurnal JURIS*, Vol. 10 No. 1, Juni 2011.

Nurjanah, Siti, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Sari, Kanthi Pamungkas, Sri Margowati, Analisis Harvard Pada Implementasi Program Kota Layak Anak, *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI, Nomor 1, Juni 2016.

Sholihah, Hani, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2018.

Zaki, Muhammad, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ASAS*, Vol.6, Nomor 2, Juli 2014.

### **Wawancara**

Aisyah (Guru TK IKI PTPN VII Blambangan Umpu), wawancara dengan penulis, TK IKI PTPN VII Blambangan Umpu, 24 November 2019.

Ciunah (Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak), wawancara dengan penulis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, 5 November 2019.

Endang Sari Ningsih (Kasi Perlindungan Khusus Anak), wawancara dengan penulis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, 4 November 2019

Eva Yusma (Orang tua anak), wawancara dengan penulis, Desa Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, 25 November 2019.

Nurlela (Kasi Pemenuhan Hak Anak), wawancara dengan penulis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, 5 November 2019.

Rismawati (Orang tua anak), wawancara dengan penulis, Desa Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, 23 November 2019

Rita Emilia (Orang tua anak), wawancara dengan penulis, Desa KM.12, Kecamatan Blambangan Umpu, 23 November 2019.

Sumarni (Orang tua anak), wawancara dengan penulis, Desa KM.08, Kecamatan Blambangan Umpu, 23 November 2019.

Yonia Ivana (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan), wawancara dengan penulis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, 4 November 2019.

**Sumber On-Line**

Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam dalam Perspektif Islam” (On-line), tersedia di: <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>. (26 Oktober 2019).

Chusniatun, “Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam” (On-Line), tersedia di: <http://journals.ums.ac.id>, (12 Juli 2019).

Indikator KLA, “Kabupaten/Kota Layak Anak” (On-line), tersedia di: <http://www.kla.id/indikator> (12 Oktober 2019).

Teras Lampung “Way Kanan Siap Jadi Kabupaten Ramah Anak” (On-line), tersedia di: <https://www.teraslampung.com/way-kanan-siap-jadi-kabupaten-ramah-anak/>, (7 Oktober 2019).

